

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (*Assessment* derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang)

Khikmawanto¹

¹STISIP Yuppentek
khikmawanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelembagaan partai politik khususnya drajat kesisteman. Wujud dari keberlanjutan partai politik adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika partai politik untuk masa depan. Terdapat elemen structural dan sikap/cultural (budaya) pada pelembagaan partai. Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antar bagian dalam tubuh partai, dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan kontinuitas dan prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep kaderisasi yang melakat dalam fungsi partai politik. Selain itu, penulis juga menggunakan teori Pelembagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand, proses pementapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara internal, Partai Gerindra kota Tangerang menghadapi pelembagaan internal partai politik yang cenderung masih mengandalkan keadaan lingkungan belum terlembaga dengan maksimal. Upaya yang harus dilakukan adalah perkaderan struktur partai harus di maksimalkan agar membentuk pola dan menjadi karakter partai dan juga memaksimalkan fungsi partai politik secara umum dengan maksimal.

Kata kunci : Kader, Pengelolaan, Kelembagaan

PENDAHULUAN

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan yang penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi. Pendekatan institusional memandang partai politik sebagai lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan¹. Secara ideal partai politik dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai². Partai politik merupakan representatif of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokratis³. Melalui partai politikkah sirkulasi kepemimpinan politik sebuah Negara penganut sistem demokrasi berjalan.

Namun yang banyak terjadi sekarang ini adalah proses seleksi yang serampangan tanpa kaedah-kaedah tertentu yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bahwa parpol tidak menseleksi secara ketat

¹ Rahman Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*, Surabaya: SIC, hal. 21

² T May.Rudy, 2003, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung, Refika Aditama, hal. 87

³ Robert Michael, 1984, *Partai Politik dalam Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press, hal.. 24

siapa-siapa yang akan dijadikan wakil rakyat nantinya. Para pemimpin partai politik besar di Indonesia kerap berasal bukan dari kualifikasinya, melainkan dari unsur “kebangsawanan” tertentu.

Berdasarkan pada kajian lainnya yang menyebutkan bahwa eksistensi suatu partai politik bertalian erat dengan rakyat atau massa. Oleh karena itu, partai-partai politik sangat tergantung oleh kuasa massa dalam arti butuh

Dalam pelaksanaan pengkaderan di DPC Partai Gerindra kota Tangerang, pengurus dan program kerja merupakan cara yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam proses kaderisasi. Namun, perencanaan dan pelaksanaan belum berjalan sempurna. Perencanaan merupakan hal yang paling utama agar fungsi dari manajemen suatu organisasi itu tercapai. Fungsi manajemen mengharuskan suatu organisasi merencanakan hal-hal apa yang nantinya akan dilaksanakan berupa penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan serta metode anggaran dan standar yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi merupakan landasan bagi kader untuk ikut berkontestasi dalam segala bidang baik pengurus partai maupun legislative dan eksekutif. Kurangnya intensitas pendidikan politik membawa pengaruh besar terhadap eksistensi partai di tengah masyarakat karena perkaderan politik dilakukan untuk mengembangkan kader terutama pengurus partai agar lebih militan dan loyal dalam menjalankan roda organisasi. Perencanaan juga terlihat dari tidak adanya seleksi yang memadai untuk merekrut kader berdasarkan kualifikasinya. Perkaderan yang dilakukan diikuti oleh setiap pengurus partai baik jenjang kader bawah maupun kader yang sudah memiliki prestasi ataupun telah memiliki pengalaman yang panjang.

Untuk itu penelitian ini hanya akan memfokuskan diri pada system internal yang berjalan, gunanya untuk melihat seberapa jauh pelembagaan partai politik Gerindra kota tangerang sudah di wujudkan baik oleh pengurus partai maupun aturan secara institusi.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang membantu penulis untuk memahami perkaderan Pengurus DPC Partai Gerindara kota Tangerang. Diantara penelitian yang sudah dilakukan adalah perkaderan partai politik pernah dilakukan oleh Akbar Sandro Yudho Dhiarso⁴ melakukan penelitian tesisnya mengenai system pengkaderan dikalangan partai islam, Dengan memfokuskan pada Tarbiyah PKS perlu di kaji ulang mengingat sistem ini tertutup cenderung *eksklusif* dan menghasilkan kader kolot dan kaku. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Joko Susanto⁵ mengenai perkaderan DPC partai Gerindra kota Bandung dengan hasil penelitian menemukan, kader-kader DPC partai Gerindra kota Bandung mengikuti instruksi dari DPP melakukan proses pengkaderan di pusat pelatihan partai yang terletak di

⁴ Akbar Sandro Yudho Dhiarso, “System Perkaderan Partai dikalangan Partai Islam” Studi tentang tarbiyah PKS di Yogyakarta, Yogyakarta : Tesis Magister Studi Politik dan Pemerintahan Islam, Program Studi Hukum Islam, Univ. Islam Negeri sunan Kalijaga, 2015, Hal. 23-101

⁵ Joko Susanto, “Peran Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik” Studi Kasus Terhadap DPC Partai Gerindra di Kota Bandung, Bandung: Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ. Pasundan, 2016, hal. 25-70.

Hambalang. Artinya kader di tingkat bawah tidak punya hak untuk melakukan pengkaderan, segala sesuatu yang menyangkut pengkaderan harus patuh pada dewan pimpinan pusat partai.

Penelitian senada yang dilakukan oleh Cheppy Harycahyono⁶ studi tentang ilmu politik dan perspektifnya mengatakan bahwa menyoal partai politik tidak bisa di lepaskan tiga persoalan. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai.

Roni Tamara Saputra⁷ dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan melakukan penelitian tentang system kaderisasi dan penetapan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 partai Golongan Karya (Golkar). Hasil dari penelitian ini adalah Partai Golkar melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon anggota legislatif menggunakan sistem terbuka dan tertutup serta lebih diutamakan kader internal Golkar sendiri dengan tujuan agar kaderisasi di dalam partai Golkar ini berjalan dengan baik, dan pengembangan anggota pun dapat dilaksanakan. Proses rekrutmen politik yang dilakukan partai Golkar bersifat terbuka pada saat pendaftaran calon legislatif, artinya dalam hal ini partai Golkar tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga setiap orang berpeluang untuk menjadi kader partai Golkar yang akan di usung menjadi calon anggota legislatif. Proses ini diawali dengan pembuatan KTA bagi anggota.

Partai politik dan sistem kepartaian merupakan dua konsep berbeda. Pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Sarjana-sarjana yang berjasa memelopori antara lain Ostrogasky (1902), Michels (1911), Duverger (1951), dan Neumann (1956)⁸. Setelah itu beberapa sarjana *behaviouralis*, seperti Lapalombara dan Weiner, secara khusus mengkaji masalah partai dalam hubungannya dengan pembangunan politik. Kedua sarjana ini kemudian menuangkan pemikiran dan hasil studinya dalam bukunya yang berjudul *Political Parties and Political Development*. Di samping itu Sartori dengan bukunya *Parties and Party Systems : A Framework for Analysis* (1976) merupakan ahli yang lebih kontemporer yang terkenal.⁹ Hasil karya sarjana-sarjana di atas memperlihatkan adanya usaha serius ke arah penyusunan suatu teori yang komprehensif mengenai partai politik. Akan tetapi, sampai saat ini hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, bahkan bisa dikatakan tertinggal bila dibandingkan dengan penelitian bidang-bidang lain.

Dalam kaitannya dengan sejarah, partai berasal dari bahasa latin "*partire*", yang bermakna membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan berpolitik banyak dinilai negatif. Orator dan agitator

⁶ Cheppy hari cahyono, "*Ilmu Politik dan Perspektifnya*", Yogyakarta: Tiara Wacana, Hal. 80

⁷ Jurnal Ilmu Pemerintahan, Ejournal.ip.fisip.ac.id, 2014, system kaderisasi dan penetapan calon anggota legislaif pemilu 2009, studi kasus partai Golkar kabupaten Penajam paser utara,

⁸ Joseph Lapalombara. 1966. *Political Parties and Political Development*. New Jersey : University Press. Hal.31

⁹ Giovanni Sartori. 1984. *Parties and Party system:A Frameworks for analysis*. Cambridge: Cambridge UP. Hal.22

revolusi Prancis, Robespierre, menganggap “partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pimpinan”.¹⁰

Banyak sekali definisi partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Menurut ahli ilmu klasik dan kontemporer seperti Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya yang bersifat idiil serta materiil.¹¹ Selain itu menurut Neumann yang merupakan penulis *Modern Politics Parties*, mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan antar golongan yang mempunyai pandangan berbeda.¹²

Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.¹³ Lapalombara dan Anderson pun memberikan definisi mereka tentang partai politik. Menurut Lapalombara dan Anderson, partai politik adalah: “... *any political group, in possession of an official label and of a formal organization that links centre and locality, that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non-free), candidates for public office.* [... setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas)¹⁴ Definisi Lapalombara dan Anderson ini membatasi partai politik sebagai organisasi resmi, diakui pemerintah, dan ikut pemilihan umum. Partai politik adalah penghubung antara pusat kekuasaan dengan lokalitas (warganegara yang tersebar di aneka wilayah, agama, ideologi, dan sejenisnya). Partai politik berfungsi untuk menempatkan orang-orang (kandidat) bagi sebuah jabatan publik.

Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai menurut Vicky Randall dan Lars Svaseen adalah, proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (*the process by which the party become established in terms of both integrated*

¹⁰ Friderich. 1967. *Constitutional Government and Democracy*. Weltham : Blaisdell Publishing Company. Hal. 419

¹¹ Ibid
¹² Sigmund Naumann. 1963. *Moderen Political Parties*. London : The Press of Glencoe. Hal.43

¹³ Robert Michels. 1996. “The Iron Law of Oligarchy”. Calivornia : Wadsworth Publishing Company, hal.244

¹⁴ Joshep Lapalombara and Jeffrey Anderson. 1992, *Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge hal.393

patterns on behaviour and of attitude and culture)¹⁵. Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemnes*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Tabel 1 Dimensi Kepartaian

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Keputusan
Kultural	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Terdapat dua dimensi yaitu internal dan eksternal serta terdapat dua elemen yaitu elemen structural dan sikap/cultural (budaya) pada pelebagaan partai. Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antar bagian dalam tubuh partai, yang dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan kontinuitas dan prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Dimensi eksternal menjelaskan bahwa partai dalam melembagakan dirinya tidak hanya membentuk bagian dirinya internal saja melainkan perlu membentuk hubungan diluar partai dalam hal ini hubungan antara partai dengan pemerintahan atau bahkan dengan organisasi selaras lainnya.

Sebagaimana yang diukir dari komposisi dari beberapa dimensi pelebagaan partai diatas, terdapat empat (4) aspek yang menentukan bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan dianalisis drajat pelebagaan partai politiknya dengan melakukan penaksiran (*assessment*) terhadap tingkat pelebagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik : **Pertama**, Dimensi kesisteman. yang dimaksudkan dengan kesisteman yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara komprehensif. Kesisteman ini meliputi ruang lingkup, keanggotaan dan keberlangsungan interaksi yang membentuk partai menjadi sebuah struktur.

Dalam konteks negara dunia ketiga, drajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik (*origins*), yaitu bagaimana proses pembentukan partai politik, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) sumber daya (*resources*) yang dimiliki partai politik, terutama pendanaan, apakah partai memiliki sumber daya yang menjamin kemendiannya atau masih tergantung pada aktor yang memiliki sumber daya yang berlebih; (c) kepemimpinan (*leadership*), melihat siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani atautkah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan

¹⁵ Vicky Randal dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", dalam Jurnal party Politics, Vol. 8

mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (d) faksionalisme (*factionalism*), menyoroti siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (e) implikasi klientalisme (*clientalism*) menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme. (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART)¹⁶

Kedua, Dimensi identitas nilai. Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

Ketiga, Dimensi otonomi. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan (b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan.

Keempat, Dimensi reifikasi. Reifikasi menunjukkan Derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

Selanjutnya, menurut Vicky dan Lars Svasand, ada sebuah persoalan terkait pelembagaan yang belum terpecahkan, yakni terkait dengan masalah adaptabilitas (*adaptability*). Secara implicit konsep pelembagaan ini berdimensi waktu, karena pelembagaan membutuhkan waktu. Dipihak lain pelembagaan berkonotasi daya tahan dan stabilitas. Dengan demikian, dalam jangka panjang, kemampuan partai politik hidup sebagai sebuah lembaga menunjukkan kemampuan partai politik tersebut beradaptasi. Adaptasi ini merupakan konsep yang lebih pro aktif, dibandingkan bertahan dan stabilitas. Selain itu adaptasi juga menunjukkan proses penyesuaian diri terhadap tekanan yang

¹⁶ Randal dan Svasand, Op. Cit, halaman 17-21

muncul baik dari eksternal maupun internal partai¹⁷.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana pelembagaan partai politik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Selanjutnya agar penelitian mempunyai kualitas yang tinggi, maka penelitian ini dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan bersangkutan untuk diperhatikan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi tentang pelembagaan partai politik. Data sekunder merupakan informasi yang pada mulanya dikumpulkan untuk suatu tujuan lain yang dimaksudkan sebagai pengetahuan ilmiah. Data ini diperoleh dari buku-buku, berkas-berkas instansi atau institusi, sumber dokumentasi yang berupa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik, artikel atau makalah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Partai Gerindra kota Tangerang

Kader Partai Gerindra kota Tangerang adalah anggota Partai Gerindra kota Tangerang yang merupakan tenaga inti, pemikir, pembawa gagasan, penggerak dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin di segala bidang, yang pendidikan dan pelatihannya diatur dalam rencana induk kaderisasi Partai Gerindra kota Tangerang.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap kader Partai Gerindra kota Tangerang dibentuk dan dibina agar memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita perjuangan organisasi, bertanggungjawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi. Secara teknis kader Partai Gerindra kota Tangerang dibentuk untuk memiliki kepemimpinan, kemandirian dan popularitas. Namun dalam proses regenerasi kader Partai Gerindra kota Tangerang masih ditemukan kader-kader yang tidak berkompeten. Kader yang kompeten mampu membawa perubahan yang signifikan dalam partai dan masa partai sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Partai Gerindra kota Tangerang memang memperbolehkan terjadinya rangkap jabatan dalam kepengurusan. Hal ini juga dikarenakan minimnya kader-kader profesional dalam tubuh Partai Gerindra kota Tangerang. Padahal secara umum rangkap jabatan tidak diizinkan dalam berbagai organisasi. Ini dikarenakan rangkap jabatan memiliki resiko terpecahnya konsentrasi, waktu yang tidak cukup dan memicu konflik kepentingan. Pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Menjadi pengurus bukanlah segala-galanya. Yang lebih penting adalah menjadi wakil rakyat. Akibatnya, menjadi pengurus dianggap keharusan dan kelak dapat sekaligus menjadi wakil rakyat. Dua-duanya dirangkap sekaligus, dan untuk seterusnya partai

¹⁷ Akbar Tanjung, Ringkasan Desertasi : *Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi, Tantangan dan Respon*, halaman 9

politik hanya akan berfungsi sebagai kendaraan bagi individu para pengurusnya untuk mempertahankan posisi sebagai wakil rakyat ataupun meraih jabatan-jabatan publik lainnya.

Kader partai dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan kader ini, dilakukan untuk mempermudah proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Secara umum kader Partai Gerindra kota Tangerang dikelompokkan menjadi lima yaitu: Kader Penggerak Partai, Kader Fungsional, Kader Teritorial Kelurahan, Kader Penggerak Pemerintahan dan Kader Penggalang. Setiap kelompok kader tersebut memiliki tugas tersendiri. Secara umum, tugas-tugas kader itu bertujuan demi tercapainya cita-cita Partai Gerindra kota Tangerang. Dalam perjalanannya, kebijakan dan strategi pengkaderan Partai Gerindra kota Tangerang mengalami modifikasi, penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.

Setiap kelompok kader tersebut memiliki tugas tersendiri. Secara umum, tugas-tugas kader itu bertujuan demi tercapainya cita-cita Partai Gerindra kota Tangerang. Dalam perjalanannya, kebijakan dan strategi pengkaderan Partai Gerindra kota Tangerang mengalami modifikasi, penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.

Dimensi Struktural Partai Gerindra kota Tangerang

Sebagai Partai Politik, Partai Gerindra kota Tangerang berkewajiban untuk menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan rekrutmen politik dan mengembangkan kepemimpinan yang diabdikan bagi kepentingan organisasi, maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Guna menciptakan organisasi yang demikian, maka pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Hal ini sepenuhnya ditujukan untuk menopang keberadaan Partai Gerindra kota Tangerang sebagai organisasi social politik yang handal dalam kurun waktu yang panjang dan oleh karena itu Partai Gerindra kota Tangerang dituntut untuk menyediakan kelompok kader pada semua strata organisasi yang memiliki keahlian profesional, kemampuan intelektual, kepekaan social yang tinggi, serta keterampilan operasional sesuai kedudukan dan tantangan, baik dalam ljangkup local, regional, nasional, maupun global. Kader Partai Gerindra kota Tangerang merupakan inti, pemikir, pembawa gagasan, dan pelaksana yang tangguh, serta harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang berat, memecahkan permasalahan, mampu melaksanakan kegiatan kongkret dan mampu menghasilkan presentasi kerja yang maksimal.

Upaya pelebagaan Partai Gerindra kota Tangerang dapat dikatakan tidak berjalan maksimal. Salah satunya adalah database tidak menyesuaikan perkembangan secara berkala. Hal ini menyebabkan sulit mengetahui perkembangan kader-kader Partai Gerindra kota Tangerang. Selain itu, rendahnya frekuensi pelaksanaan diklat yang berbasis kaderisasi turut membuktikan belum berjalannya upaya kaderisasi secara optimal. Diklat merupakan salah satu bagian penting dari proses kaderisasi yang turut menentukan kapasitas dan kemampuan kader.

Pada dasarnya diklat dilaksanakan secara berkala minimal setahun sekali. Setiap diklat itu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu tahap saja. Setiap agenda yang diperjuangkan oleh

Partai Gerindra kota Tangerang dilaksanakan secara terus-menerus karena proses kaderisasi dalam Partai Gerindra kota Tangerang merupakan proses yang berjangka panjang untuk meningkatkan kualitas kader-kader secara menyeluruh. Proses kaderisasi yang berjangka panjang membutuhkan keseriusan pengurus untuk merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kaderisasi. Kurang diperhatikannya kegiatan yang berorientasi pada pendidikan kader mengakibatkan sulitnya untuk menemukan kader yang memiliki loyalitas terhadap Partai Gerindra kota Tangerang. Hal ini akan berdampak pada citra Partai Gerindra kota Tangerang di masyarakat.

Diketahui bahwa tahun 2015 merupakan tahun kaderisasi Partai Gerindra kota Tangerang yang mana menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan diklat menunjang proses kaderisasi dilakukan berkesinambungan untuk membentuk kader-kader potensial dalam menghadapi pemilu legislatif 2015. Namun, DPD Partai Gerindra kota Tangerang kurang memperhatikan pelaksanaan diklat sebagai tahap awal kaderisasi untuk membentuk kader-kader. Selain itu, berbagai faktor penghambat lainnya seperti dana, kesibukan pengurus dan agenda partai menjadikan pelaksanaan diklat hanya dilaksanakan pada tahun 2015.

Semua anggota wajib mengikuti pendidikan-pendidikan yang diadakan pengurus. Setelah pendidikan selesai, anggota dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses seleksi yang dilakukan pengurus terhadap anggota-anggota Partai Gerindra kota Tangerang dengan menilai keaktifan seseorang dalam mengikuti pendidikan yang diadakan oleh Partai Gerindra kota Tangerang. Dalam proses seleksi, kemampuan kader bukanlah satu-satunya penentu. Adanya penilaian dari pengurus lebih menentukan posisi kader tersebut. Meskipun demikian, proses seleksi tidak mutlak dilaksanakan.

Proses seleksi yang telah diciptakan dan dilaksanakan oleh Partai Gerindra kota Tangerang tidak sepenuhnya menjadi langkah-langkah yang harus dilewati oleh semua kader Partai Gerindra kota Tangerang. Kedekatan kader dengan pengurus inti baik satu level maupun dengan level yang lebih tinggi turut mempengaruhi proses seleksi kader. Kader yang memiliki kedekatan dengan pengurus mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang belum tentu sesuai dengan kapasitasnya.

Pelaksanaan Sistem Kaderisasi Partai Gerindra kota Tangerang.

Partai Gerindra kota Tangerang dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik menempatkan proses kaderisasi sebagai bagian utama aktivitas organisasi. Kesadaran ini dibangun atas suatu harapan bahwa proses pengkaderan yang mantap akan melahirkan kader yang berkualitas dalam jumlah yang memadai, sehingga mampu mendorong dinamika Partai Gerindra kota Tangerang dalam melaksanakan program, menuju pencapaian tujuan partai. Tantangan yang mengemuka dalam dinamika politik dewasa ini yang dihadapi Partai Gerindra kota Tangerang adalah bagaimana Partai Gerindra kota Tangerang dapat melakukan kegiatan kaderisasi dan pelatihan secara terencana, berkesinambungan, terintegrasi, mencakup seluruh jenis dan jenjang pengkaderan dan pelatihan yang dapat menjangkau semua semua jenjang organisasi dan mampu mencapai target yang ditetapkan.

Proses kaderisasi yang dijalankan Partai Gerindra kota Tangerang secara internal meliputi tiga kategori pengkaderan yaitu:

1. Pengkaderan umum

Pengkaderan umum merupakan pengkaderan politik yang bersifat structural maupun fungsional. Pengkaderan yang bersifat structural adalah pengkaderan yang dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Lemabga Pengelola Kaderisasi LPK) Partai Gerindra kota Tangerang sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan pengkaderan yang bersifat fungsional adalah perkaderan yang diikuti oleh kelompok-kelompok fungsional berdasarkan pengelompokan strategis (pemuda, perempuan, pengusaha, toho agama, tani, nelayan, cendekiawan, pendidik,pers,pekerja,seniman/budayawan),yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekelompok strategis yang bersangkutan bekerja sama dengan LPK sesuai dengan tingkatannya. Pengkaderan ini ditujukan untuk kader madya. Yaitu kader penggalang dan kader fungsional.

Salah satu bentuk pengkaderan umum yang telah dilaksanakan Partai Gerindra kota Tangerang adalah konsolidasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 diikuti oleh pengurus Partai Gerindra kota Tangerang dan kader-kader tingkat kelurahan se-Kecamatan Lima Puluh. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan konsolidasi tidak lagi sesuai dengan konsep. Kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan materi yang seharusnya.

Minimnya kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dan ditambah lagi tidak sesuai konsep yang seharusnya menjadikan sistem kaderisasi pada Partai Gerindra kota Tangerang macet. Kegiatan konsolidasi merupakan bagian pendukung dalam sistem kaderisasi untuk membentuk kader-kader profesional yang nantinya akan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Kegiatan konsolidasi politik Partai Gerindra kota Tangerang belum berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Kader-kader tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada pencapaian tujuan dan cita-cita Partai Gerindra kota Tangerang.

2. Pengkaderan Khusus

Pengkaderan khusus adalah pengkaderan yang diselenggarakan oleh partai yang ditujukan kepada kader-kader yang akan dan atau sedang menduduki posisi-posisi tertentu (jabatan politik pada legislatif, eksekutif, maupun jabatan-jabatan fungsional kemasyarakatan lainnya) dalam rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan partai yang dilaksanakan oleh LPK sesuai dengan tingkatannya. Peserta pengkaderan khusus di semua tingkatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti pengkaderan umum.
2. Diusulkan oleh Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pengkaderan ini ditujukan untuk kader calon politisi, yaitu kader pemerintahan dan kader penggerak partai.

Pengkaderan khusus yang telah dilaksanakan Partai Gerindra kota Tangerang adalah Orientasi Fungsionaris yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 di Hotel Alium. Tujuan Orientasi

Fungsionaris adalah membentuk kecakapan dan militansi kader Pemilu 2014 dan Partai Gerindra kota Tangerang membutuhkan pemimpin yang handal.

Dasar pemikiran diadakannya pelatihan kader ini adalah untuk menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014, dimana Partai Gerindra kota Tangerang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kompetisi politik pada 2014 mendatang. Orientasi Fungsionaris adalah forum untuk memahami dan mampu menjelaskan Hasil Munas, Hasil Rapimnas, Hasil Rakornas, JUKLAK, Peraturan Organisasi dan sikap-sikap kebijakan partai sebagai langkah-langkah strategis mencapai tujuan partai. Fungsionaris adalah duta-duta partai di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan Orientasi Fungsionaris dilaksanakan untuk membentuk kader yang siap mengikuti Pemilu Legislatif 2014. Kegiatan ini diikuti oleh kader-kader yang memiliki ambisi untuk maju sebagai calon wakil rakyat dengan membawa tujuan dan cita-cita Partai Gerindra kota Tangerang. Manfaat yang didapat oleh peserta setelah mengikuti orientasi fungsionaris akan membantunya menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

Melihat peranan yang sangat vital bagi kader untuk menjalankan roda organisasi partai, Partai Gerindra kota Tangerang harus dapat melakukan kegiatan pengkaderan secara terencana, berkesinambungan, terintegrasi, dan mencakup seluruh jenis dan jenjang pengkaderan yang dapat menjangkau semua jenjang organisasi dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Proses kaderisasi merupakan hal penting dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas dan loyal sehingga dapat memperkuat basis partai di tengah masyarakat serta tetap menjaga keberadaan partai. Meskipun demikian, pelaksanaan diklat Orientasi Fungsionaris ini tidak dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk membentuk kader yang berkualitas.

Orientasi Fungsionaris yang seharusnya menjadi landasan bagi kader-kader yang akan menduduki jabatan legislatif tidak lagi disesuaikan dengan kapabilitasnya. Faktor-faktor lain diluar kapabilitas dan loyalitas kader jauh lebih mempengaruhi kesempatan yang dimiliki untuk menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra kota Tangerang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Orientasi Fungsionaris bukanlah lagi syarat utama bagi kader potensial untuk maju dalam pemilihan legislatif.

Secara umum calon legislatif yang diusung Partai Gerindra kota Tangerang pada Pemilu Legislatif 2014 telah memenuhi syarat tersebut. Tetapi masih ditemukan kader-kader yang kurang memiliki loyalitas terhadap partai.

Adanya kader-kader yang kurang kompeten akan mengurangi peluang Partai Gerindra kota Tangerang untuk menang dan menurunkan citra Gerindra kota Tangerang dimasyarakat. Selain itu, kader yang kurang berkompeten akan menyebabkan kemunduran secara bertahap pada Partai Gerindra kota Tangerang. Kader-kader tersebut hanya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa keuntungan bagi dirinya. Hal ini akan menyebabkan eksistensi Partai Gerindra kota Tangerang ditengah masyarakat mengalami penurunan.

3. Pengkaderan Teritorial Kelurahan

Pengkaderan teritorial Kelurahan merupakan pengkaderan yang dilakukan oleh partai di tingkat Kelurahan dalam rangka memperluas basis massa. Untuk pengkaderan teritorial Kelurahan pesertanya adalah sebagai berikut:

1. Anggota, simpatisan Gerindra kota Tangerang yang berdomisili di Kelurahan
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah menikah

Pengkaderan ini ditujukan untuk kader pemula, yaitu: Kader teritorial kelurahan.

Dalam Buku Materi Pendidikan Dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa, pengkaderan teritorial kelurahan dilaksanakan secara reguler dalam jangka waktu tertentu. Pengkaderan teritorial kelurahan merupakan tahap awal bagi kader-kader untuk menjadi kader profesional Partai Gerindra kota Tangerang. Namun, saat ini kegiatan pengkaderan teritorial kelurahan tidak lagi terlaksana.

Tidak berjalannya pengkaderan teritorial kelurahan pada Partai Gerindra kota Tangerang menandakan terjadinya kemandekan pada sistem kaderisasi Partai Golkar Kota Pekanbaru. Pengkaderan teritorial kelurahan yang merupakan langkah awal bagi kader untuk mulai mengenal dan memahami Partai. Sehingga, kebijakan-kebijakan Partai hanya bersifat secara umum berlaku pada kader-kader yang ada pada level Kota tidak mencakup kader-kader yang ada pada tingkat kelurahan.

Proses pengkaderan Partai Gerindra kota Tangerang melibatkan kader atau anggota partai dan peserta pengkaderan sesuai dengan jenis pengkaderan Partai Gerindra. Dalam proses menciptakan Partai Gerindra kota tangerang yang mampu menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat maka pengembangan sumber daya manusia terus ditingkatkan. Namun, Partai Gerindra Kota Tangerang belum mampu untuk menyediakan kelompok kader pada semua tingkatan organisasi, ditambah lagi kader-kader tersebut masih banyak yang belum memiliki tanggungjawab dan kesetiaan yang tinggi. Maka dari itu, pendidikan politik yang terukur dan terarah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan berperan dalam mempersiapkan kader-kader partai. Adapun tujuan kaderisasi Partai Gerindra yaitu menjaga kesinambungan partai, terjadi regenerasi yang alamiah dan menghasilkan kader yang militan, kompeten dan disiplin masih jauh dari harapan.

KESIMPULAN

Senada yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti juga menyatakan, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik. Dari

pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mempercepat konsolidasi demokrasi.

Jika memperhatikan dari assessment model Vicky Randall maka hasil pemaparan bahasan diatas partai gerindra kota tangerang masih jauh dari pelembagaan partai politik. Bisa jadi tidak hanya di Gerindra kota Tangerang saja, hampir partai-partai diIndonesia mengalami hal yang sama. Bergantungnya figure partai menjadi masalah sentral yang harus segera diselesaikan, untuk itu partai Gerindra kota Tangerang harus menanta ulang proses perkaderan agar partai ini bisa menjadi motor kebangkitan pelembagaan partai politik di Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

Buku:

- Andrianus, Toni. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Kartono, Kartini, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Cv. Mondar Maju, Bandung: 2009
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Mas'ood, Muchtar Dan Collin Mc Andrews, *Penbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Pres: Yogyakarta 1998
- Mus'iz Ruslan Utsman Abdul, *Pendidikan Politik ikhwanul Muslimin*. Intermedia, Solo, 2000
- Prof. Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Rasyid, Ryas, *Nasionalisme Dan Demokrasi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 1999
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1999
- W. Creswell John, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010
- Sigmund Naumann. 1963. *Moderen Political Parties*. London : The Press of Glencoe. Hal.43
- Robert Michles. 1996. "The Iron Law of Oligarchy". Calivornia : Wadsworth Publishing Company,hal.244
- Joshep Lapalombara and Jeffrey Anderson. 1992, *Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge hal.393
- Friderich. 1967. *Constitutional Government and Democracy*. Weltham : Blaissdell Publishing Company. Hal. 419
- Cheppy hari cahyono, *"Ilmu Politik dan Prespektifnya"*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Hal. 80
- Joseph Lapalombara. 1966. *Political Parties and Political Development*. New Jersey : University Press. Hal.31
- Giovanni Sartori. 1984. *Parties and Party system:A Frameworks for analysis*. Combridge: Cambridge UP. Hal.22

Rahman Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*, Surabaya: SIC, hal. 21

T May.Rudy, 2003, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung, Refika Aditama, hal. 87

Jurnal:

Vicky Randal dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", dalam Jurnal party Politics, Vol. 8

Akbar Tanjung, Ringkasan Desertasi : *Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi, Tantangan dan Respon*, halaman 9

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Ejournal.ip.fisip.ac.id, 2014, system kaderisasi dan penetapan calon anggota legislaif pemilu 2009, studi kasus partai Golkar kabupaten Penajam paser utara

Tesis/Skripsi

Akbar Sandro Yudho Dhiharso, 2015 "System Perkaderan Partai dikalangan Partai Islam" Studi tentang tarbiyah PKS di Yogyakarta, Yogyakarta : Tesis Magister Studi Politik dan Pemerintahan Islam, Program Studi Hukum Islam, Univ. Islam Negeri sunan Kalijaga, Hal. 23-101

Joko Susanto, 2016 "*Peran Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik*" Studi Kasus Terhadap DPC Partai Gerindra di Kota Bandung, Bandung: Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ. Pasundan, hal. 25-70